

**ANALISIS KOLABORASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DENGAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

FIKRI IBNU MUBAROK

NPM 2256021005



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KOLABORASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DENGAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)

Oleh

FIKRI IBNU MUBAROK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kolaborasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) di Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum optimalnya proses kolaborasi yang ditandai dengan lemahnya koordinasi, perbedaan peran kelembagaan, serta belum adanya penguatan kerja sama secara formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antara DISPORA dan KONI dalam penyelenggaraan PORCAM menggunakan perspektif *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak DISPORA, KONI, DISDIK, Kecamatan, Atlet yang terlibat dalam penyelenggaraan PORCAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara DISPORA dan KONI telah berjalan, namun belum optimal pada beberapa dimensi, khususnya pada aspek komitmen terhadap proses. Hal ini ditandai dengan belum adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar formal kerja sama, sehingga pelaksanaan kolaborasi masih bergantung pada kesepahaman informal. Selain itu, kendala lain yang ditemukan meliputi kurangnya koordinasi, belum optimalnya kepercayaan, serta belum terbangunnya kesamaan pemahaman antar aktor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi melalui penyusunan MOU dan PKS guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan PORCAM di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kolaborasi Antar Lembaga, DISPORA, KONI, Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM)

ABSTRACT

ANALYSIS OF COLLABORATION BETWEEN THE YOUTH AND SPORTS OFFICE AND THE INDONESIA NATIONAL SPORTS COMMITTEE (Case Study in Bandar Lampung City)

By

FIKRI IBNU MUBAROK

This research is motivated by the importance of collaboration between the Department of Youth and Sports (DISPORA) and the Indonesian National Sports Committee (KONI) in organizing the Sub-district Sports Week (PORCAM) in Bandar Lampung City. The problem addressed in this study is the suboptimal collaboration process, as indicated by weak coordination, differences in institutional roles, and the absence of strengthened formal cooperation. This study aims to analyze the collaborative process between DISPORA and KONI in the implementation of PORCAM using the collaborative governance perspective proposed by Ansell and Gash (2007). The research employs a qualitative approach, with data collected through interviews and documentation. The informants include representatives from DISPORA, KONI, DISDIK sub-district officials, and athletes involved in the organization of PORCAM. The results indicate that collaboration between DISPORA and KONI has been established but remains suboptimal in several dimensions, particularly in terms of commitment to the process. This is evidenced by the absence of a Memorandum of Understanding (MoU) and a Cooperation Agreement (PKS) as formal foundations for collaboration, resulting in the implementation relying primarily on informal mutual understanding. Additionally, other challenges include inadequate coordination, limited trust, and the lack of a shared understanding among stakeholders. Therefore, strengthening collaboration through the establishment of an MoU and PKS is necessary to enhance the effectiveness, accountability, and sustainability of PORCAM implementation in Bandar Lampung City.

Keywords: *Collaborative Governance, Inter-Agency Collaboration, DISPORA, KONI, Sub-district Sports Week (PORCAM)*

**ANALISIS KOLABORASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DENGAN KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)**

Oleh

FIKRI IBNU MUBAROK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

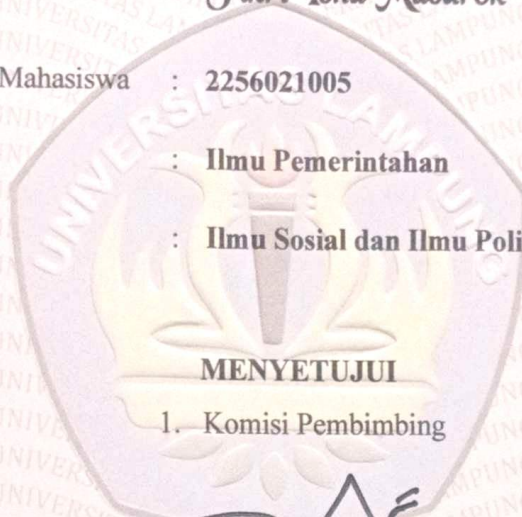
Judul Skripsi : **ANALISIS KOLABORASI DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DENGAN KOMITE OLAHRAGA
NASIONAL INDONESIA
(STUDI KASUS DI KOTA BANDAR
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Fikri Ibnu Mubarak**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2256021005**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.

NIP. 196405081993031004

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

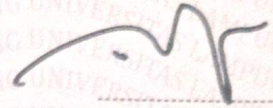
Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.

NIP. 197106042003122001

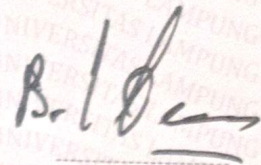
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Mei 2026



Fikri Ibnu Mubarak
NPM. 2256021005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Fikri Ibnu Mubarak, lahir di Tempuran pada 24 Juli 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Suparno dan Ibu Yulina Rostiani. Penulis memiliki satu adik laki laki yang bernama Muhammad Afif Al Irsyad. Pendidikan formal penulis di mulai di TK Aisyiyah Adipuro yang di selesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Adipuro dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan sekolah menengah atas di SMA Kebangsaan Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada progran pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan. Selama masa perkuliahan, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sendang Asih, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penulis melaksanakan MBKM Magang selama enam bulan di Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Sungguh demi Allah, Kehidupan seorang pemuda itu hendaknya disertai dengan ilmu dan tawakal”
(Imam Syafi’i)

“Tugas kita hanya mengangkat tangan (Doa),
sisanya biar tuhan yang turun tangan”

“Nawaitu lillahi ta’ala hasbunallah wani’mal wakil nimal maula wani’mal nasir.
Ya Allah berikan kemudahan atas semua perjuangan hidupku serta ubahlah masa
depanku menjadi lebih baik lagi”

“Menuju tak terbatas dan melampauinya”
(Buzz Lightyear)

"Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada-Nya kami
akan kembali."
(Q.S Al Baqarah: 156)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat-Nya. Atas ridha, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, setiap ikhtiar dan perjuangan penulis dapat dilalui hingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Karya ini penulis persembahkan dengan tulus sebagai ucapan rasa syukur, cinta, dan bakti kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberi arti dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis.

Orang Tuaku Tercinta

Ibuku tercinta Yulina Rostiani dan Ayahku Tercinta Suparno, sebagai wujud bakti dan rasa cinta yang mendalam. Terimakasih atas segala pengorbanan. Kasih sayang, kepercayaan, serta doa yang senantiasa menyertai penulis disetiap langkahnya. Semoga karya ini dapat menjadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan.

Adik laki laki

Muhammad Afif Al Irsyad terimakasih atas doa dan dukungannya.

Terima kasih untuk seluruh dosen, staf dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kolaborasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)”** Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejatinya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN.Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pokitik Unifersitas Lampung.
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, terim kasih atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si selaku dosen pembimbing utama, terimakasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segera kebaikan Bapak dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu, kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segera kebaikan Bapak dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Ibu Merta dan Mbak Wulan, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kesediaannya dalam mengurus berbagai keperluan administrasi perkuliahan selama ini. Semoga ibu dan mbak senantiasa diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh keluarga besar Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas perhatian, bimbingan, dan bantuan yang telah diberikan sejak masa magang hingga proses penelitian. Dukungan, arahan, serta suasana kerja yang hangat menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang berharga dan berarti bagi penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
9. Terima kasih kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung dan kepada Bapak Maulvie Tamizudin Yusuf, SE selaku ketua Bidang Organisasi dan Pengolahan Data (KONI) yang telah membimbing dan membantu saya dalam penelitian di Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung.
10. Untuk Ibuku tercinta, Yulina Rostiani, dan Ayahku tercinta, Suparno, S.Ag. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan hati, karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang diberikan tanpa mengenal lelah, atas kasih sayang yang tulus tanpa batas, serta atas kepercayaan dan doa yang senantiasa mengiringi

setiap langkah perjuangan penulis hingga berada di titik ini. Tidak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan betapa besar peran dan cinta yang telah Ayah dan Ibu berikan. Dalam setiap proses yang dilalui, selalu ada dukungan, nasihat, dan harapan yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan melangkah maju. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu sumber kebanggaan dan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu, sebagaimana Ayah dan Ibu selalu menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik dalam hidup. Terima kasih untuk segalanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu disetiap langkah kehidupan.

11. Terima kasih kepada Ayahanda Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tulang Bawang Hi. Mulyadi, S.P dan Ibunda Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Tulang Bawang Hj. Nining Fitriani S.Pd, yang selalu memberikan Doa, Dukungan, dan Semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan Studi S1.
12. Kepada Irmala Audea Z, A.Md., Kes Terima kasih atas pendampingan setia anda di setiap langkah, proses, dan perjuangan saya sejak masa SMA hingga kuliah.
13. Untuk sahabat 5 murid Vincent Rendi Syaputra, Muhammad A'inur Rozak, Bella Puspita Anggraeini, Anisa Christin Sitompul. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh cerita, tawa, dan kenangan yang kadang lebih random daripada isi grup chat tengah malam. Semoga pertemanan ini tetap hangat dan tidak berubah, walaupun nanti jalan hidup membawa kita ke arah yang berbeda-beda.
14. Untuk Relawan Ruhan tercinta Ardi Surya Sumirat, Adib Al Hafiz, Ruhan Amrina, Rico Christian Permita Tarigan, Febri Nur Saefuddin, Muhammad Aulia Ikhsan, Ilham Muhammad Alfarizi, Nanda Agil Wijaya Kusuma, Andika Nol Badian. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita yang penuh tawa, drama, dan perjuangan yang kadang lebih menegangkan daripada deadline dadakan. Kalian bukan sekadar teman, tapi kumpulan manusia unik dengan bakat masing-masing. Tetap jadi manusia hebat

dengan ciri khas kalian masing-masing. Karena dunia mungkin butuh orang pintar, tapi hidup juga butuh teman-teman absurd seperti kalian untuk bikin semuanya terasa lebih ringan. Salam hangat untuk para pejuang tongkrongan, penjaga tawa, dan calon orang sukses.

15. Terima kasih untuk Vickenza Dwipa, Jimy Nurmahesa, Nafian Agista. sahabat-sahabat SMA Kebangsaan yang selalu menemani dan menghibur penulis saat menulis skripsi ini
16. Terima kasih kepada Bapak Triono dan Ibu Siti Khalifah sudah menjadi sosok orang tua sewaktu KKN di Desa Sendang Asih.

Semoga Allah SWT selalu menganugerahkan kesehatan dan keberkahan serta membahas setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, namun besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Mei 2026
Penulis

Fikri Ibnu Mubarak
NPM 2256021005

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR KATA ASING.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Teori <i>Collaborative Governance</i>	18
2.1.1 Pengertian <i>Collaborative Governance</i>	18
2.1.2 Dimensi <i>Collaborative Governance</i>	19
2.1.3 Evaluasi <i>Collaborative Governance</i>	20
2.2 Bentuk-Bentuk <i>Collaborative Governance</i>	22
2.3 Kolaborasi	24
2.4 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung	25
2.5 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung	26
2.6 Peran DISPORA dan KONI.....	28
2.7 Pekan Olahraga Kecamatan	29
2.8 Tantangan dan Hambatan Dalam Kolaborasi	31

2.9 Kerangka Berpikir.....	33
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Informan Penelitian	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	38
3.8 Teknik Analisis Data	39
3.9 Validasi Data	40
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum	41
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung.....	41
4.1.2 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung	42
4.1.3 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung.....	45
4.1.4 Sejarah Pekan Olahraga Kecamatan Kota Bandar Lampung.....	50
4.2 Kolaborasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Komite Olaharag Nasional Indonesia.....	51
4.3 Hasil.....	52
4.3.1 Dialog Tatap Muka (<i>Face to Face Dialogue</i>).....	52
4.3.2 Membangun kepercayaan (<i>Trust Building</i>).....	62
4.3.3 Komitmen Terhadap Proses (<i>Commitmen To Process</i>)	69
4.3.4 Pemahaman Bersama (<i>Share Understanding</i>).....	73
4.3.5 Hasil Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>)	80
4.4 Pembahasan.....	88
4.4.1 Analisis Dimensi Dialog Tatap Muka (<i>Face to face dialogue</i>)	88
4.4.2 Analisis Dimensi Membangun Kepercayaan (<i>Trust Building</i>).....	92
4.4.3 Analisis Dimensi Komitmen Terhadap Proses (<i>Commitmen To Process</i>)	95
4.4.4 Analisis Dimensi Pemahaman Bersama (<i>Share Understanding</i>).....	98
4.4.5 Analisis Dimensi Hasil Sementara (<i>Intermediate Outcomes</i>).....	101
4.5 Permasalahan Penyelenggaraan PORCAM di Kota Bandar Lampung.....	105

V. SIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Simpulan	108
5.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Pelaksanaan Pekan Olahraga Kecamatan	6
Tabel 1.2 Urutan Kecamatan Paling Optimal Hingga Kurang Optimal	11
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Informan Penelitian	37
Tabel 4.1 Komposisi pegawai menurut jenis kelamin (Posisi Maret 2021)	44
Tabel 4.2 Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan (Posisi Maret 2021)	44
Tabel 4.3 Sarana olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	45
Tabel 4.4 Triangulasi Sumber Dialog Tatap Muka	90
Tabel 4.5 Triangulasi Sumber Membangun Kepercayaan.....	94
Tabel 4.6 Triangulasi Sumber Komitmen Terhadap Proses	97
Tabel 4.7 Triangulasi Sumber Pemahaman Bersama	100
Tabel 4.8 Triangulasi Sumber Hasil Sementara.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung	43
Gambar 4.2 Program Kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung 2020-2024	48
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung	49
Gambar 5.1 Rapat persiapan PORCAM Kota Bandar Lampung	61
Gambar 5.2 Surat rapat kordinasi PORCAM	62
Gambar 5.3 Surat keputusan pimpinan komite olahraga nasional indonesia Kota Bandar Lampung	68
Gambar 5.4 Jadwal pelaksanaan pembukaan pekan olahraga kecamatan Kota Bandar Lampung Tahun 2024.....	73
Gambar 5.5 Postingan Instagram	80
Gambar 5.6 Postingan Instagram Pertandingan PORCAM.....	87
Gambar 5.7 Urutan Kecamatan Yang Optimal Hingga Kurang Optimal	87

DAFTAR KATA ASING

<i>World Health Organization</i>	: Organisasi Kesehatan Dunia
<i>Talent Pipeline</i>	: Jalur Pengkaderan Atlet
<i>Good Governance</i>	: Pemerintahan Yang Baik
<i>Stakeholders</i>	: Pemangku Kepentingan
<i>Face to face</i>	: Dialogue
<i>Trust building</i>	: Kepercayaan
<i>Commitment To Process</i>	: Komitmen padatujuan
<i>Share Understanding</i>	: Berbagi Pemahaman
<i>Intermediate Outcomes</i>	: Hasil Antara
<i>Win-to-win</i>	: Menang menang
<i>State</i>	: Negara
<i>Private</i>	: Swasta
<i>Society</i>	: Masyarakat
<i>Editing</i>	: Mengedit
<i>Interpretasi</i>	: Penafsiran

DAFTAR SINGKATAN

DISPORA	: Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
DISDIK	: Dinas Pendidikan
PERDA	: Peraturan Daerah
PLT	: Pelaksana Tugas
PKS	: Perjanjian Kerjasama
SK	: Surat Keputusan
PORPROV	: Pekan Olahraga Provinsi
PON	: Pekan Olahraga Nasional
PORCAM	: Pekan Olahraga Kecamatan
UU	: Undang Undang
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
RI	: Republik Indonesia
MOU	: <i>Memorandum Of Understanding</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Olahraga memiliki peranan penting dalam membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan berkarakter. Aktivitas olahraga tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental, sosial, dan moral individu. Dalam konteks pembangunan daerah dan nasional, olahraga menjadi sarana strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mencakup kesehatan fisik, mental, sosial, bahkan pembangunan nasional. Secara fisik, olahraga bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran, mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh (World Health Organization, 2020).

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung memiliki peran yang sangat krusial dalam mengembangkan potensi pemuda dan olahraga di wilayah Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sebagai lembaga pemerintah daerah, Dinas ini bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempromosikan berbagai program yang berkaitan dengan pemuda dan olahraga. Fungsi utama DISPORA mencakup pengembangan bakat atlet, penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan pemuda, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam dunia olahraga. Melalui keberadaan dinas ini, diharapkan dapat terwujud generasi muda yang tidak hanya sehat dan

berprestasi, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Hal ini penting agar mereka dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa dan daerah.

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan akses otonomi dan tugas perbantuan. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (LKIP DISPORA, 2022) Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan Dan Olahraga.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) Pembinaan dan pengawasan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 4) Pengkoordinasian dengan lembaga lain di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Pemuda adalah pilar masa depan suatu bangsa memberikan makna semangat pada generasi bangsa ini (Dwisvimiari & Setiawan, 2021). Dengan mengadakan pelatihan, kompetisi, dan program pengembangan, Dinas ini berupaya untuk menggali dan mengasah potensi atlet muda di kota tersebut. Selain itu, Dinas juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, komunitas, dan organisasi olahraga, untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi pemuda dalam berolahraga.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah lembaga yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengembangan olahraga di tingkat nasional. Didirikan untuk mengelola dan mengembangkan berbagai cabang olahraga di Indonesia, KONI bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atlet di kancah nasional maupun internasional. Fungsi utama KONI mencakup pengembangan dan pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi olahraga, serta penguatan organisasi olahraga di seluruh Indonesia. Selain itu, KONI juga berperan dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi internasional, untuk mendukung pengembangan olahraga yang berkelanjutan. Melalui perannya, KONI diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi atlet untuk berprestasi, serta mempromosikan nilai-nilai sportivitas dan kebanggaan nasional melalui olahraga.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di Indonesia. Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga, KONI memiliki tugas dan fungsi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan, koordinasi, serta pengembangan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun daerah. (AD ART KONI, 2020), Adapun tugas pokok dan fungsi KONI adalah sebagai berikut:

KONI mempunyai tugas:

- 1) Membantu Pemerintah, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah;
- 2) Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota;
- 3) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;

- 4) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional dan daerah;
- 5) Membantu dan mendukung penyelenggaraan single event / kejuaraankejuaraan yang diselenggarakan oleh anggota;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan;
- 7) Menyebarluaskan semangat gerakan olimpiade.

KONI mempunyai fungsi:

- 1) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional
- 2) Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal.

Kota Bandar Lampung, sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Terletak di pesisir selatan Pulau Sumatera, kota ini tidak hanya dikenal sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Potensi olahraga di Bandar Lampung terlihat dari keberadaan berbagai fasilitas olahraga yang memadai, seperti stadion, lapangan, dan pusat pelatihan yang mendukung pengembangan berbagai cabang olahraga. Serta memiliki potensi olahraga yang cukup besar dan beragam baik olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang bertujuan untuk mendapat kesenangan dan kegembiraan. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang bertujuan untuk mendapat prestasi pada cabang olahraga masing-masing (Mujib & Pramono, 2020 : 119).

Kota Bandar Lampung miliki komunitas olahraga yang aktif, dengan banyak klub dan organisasi yang berfokus pada pengembangan atlet muda. Berbagai cabang olahraga, seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, dan atletik, telah mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, Bandar Lampung juga sering menjadi tuan rumah berbagai event olahraga, baik tingkat

lokal maupun nasional, yang semakin meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Dari segi sumber daya manusia, Bandar Lampung memiliki 1.077.664 jiwa penduduk (Lamp, 2024) di antara 1.077.664 jiwa penduduk banyak pemuda yang berbakat dan berpotensi untuk berprestasi di bidang olahraga. Dengan dukungan dari DISPORA serta KONI, upaya pengembangan bakat atlet muda semakin intensif dilakukan. Selain itu, budaya olahraga yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat juga menjadi faktor pendorong bagi peningkatan prestasi olahraga di kota ini.

Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) berfungsi sebagai ajang deteksi dini dan pembinaan awal bagi atlet-atlet potensial, yang belum tentu terjangkau oleh jalur pendidikan formal atau klub olahraga komersial. Dalam konteks ini, PORCAM memberikan ruang yang lebih inklusif bagi pemuda dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk menunjukkan kemampuan dan mengembangkan bakat mereka secara terbuka. Selain itu, pelaksanaan PORCAM akan dilaksanakan di 20 kecamatan yang ada di bandar lampung agar menciptakan kompetisi yang lebih merata, adil, dan partisipatif, sehingga mampu memperluas basis pembinaan olahraga prestasi di Kota Bandar Lampung. Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Bandar Lampung, Nero Rakhmat Akbar mengatakan pelaksanaan Porcam ini didasarkan pada SK Pimpinan Koni Kota Bandar Lampung Nomor: Skep. 016/KONI-BL/SK/VI/2024, yang mengatur tentang susunan panitia pengarah/pendamping untuk Porcam Bandar Lampung tahun 2024. (Lpg, 2024)

Lebih dari sekadar turnamen lokal, PORCAM telah bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem pembinaan olahraga jangka panjang, atau yang dalam istilah manajemen olahraga disebut sebagai *talent pipeline* (jalur pengkaderan atlet). Atlet-atlet yang berhasil menunjukkan performa unggul di pekan olahraga kecamatan akan dipantau dan dipersiapkan untuk berkompetisi

di ajang yang lebih tinggi seperti Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV), bahkan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON). Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pekan olahraga kecamatan diadakan untuk mencari bibit para atlet Kota Bandar Lampung yang akan di pertandingkan di tingkat nasional. (Mtr, 2024) Artinya, PORCAM tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi titik awal dari siklus pembinaan yang berkelanjutan dan berjenjang.

Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) tahun 2019 di laksanakan di Teluk Betung Selatan dan dibuka oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN pada tanggal 21 Maret 2019. (Lustikasari, 2019) Ajang ini melibatkan ratusan atlet dari berbagai kelurahan dan menjadi wadah pembinaan sekaligus peningkatan semangat olahraga masyarakat. selanjutnya tradisi penyelenggaraan PORCAM terus berlanjut, di mana Pelaksanaan PORCAM Kota Bandar Lampung diadakan di 20 Kecamatan dan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli sampai 10 Agustus 2024.

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pekan Olahraga Kecamatan

Tahun	Jumlah Kecamatan	Cabang Olahraga	Catatan Khusus
21-3-2019	1	1. Bola Voli 2. Bulu Tangkis 3. Futsal 4. Catur	Terlaksana di beberapa kelurahan
22-7-2024	20	1. Sepak Bola 2. Bola Voli 3. Bulu Tangkis 4. Tenis Meja 5. Catur	Terlaksana di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

Sumber: Lampung Geh, Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) Teluk Betung Selatan Resmi Dibuka, Lampung viva, Porcam Bamdar Lampung digelar 22 juli hingga 10 agustus 2024.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) di Kota Bandar Lampung sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1.1 menunjukkan adanya

perkembangan signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2024, baik dari segi jumlah kecamatan yang terlibat maupun ragam cabang olahraga yang dipertandingkan. Pada tahun 2019, kegiatan ini hanya dilaksanakan di satu kecamatan dengan cakupan cabang olahraga yang terbatas. Sementara itu, pada tahun 2024, PORCAM berhasil menjangkau seluruh 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan cakupan cabang olahraga yang lebih beragam dan pelaksanaan yang lebih terstruktur. Hal ini mencerminkan peningkatan komitmen pemerintah daerah dan KONI dalam memperluas akses serta partisipasi masyarakat terhadap kegiatan olahraga berbasis komunitas lokal.

Keberhasilan pelaksanaan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) sering kali diukur dengan berbagai indikator, seperti jumlah pertandingan yang diadakan, jumlah peserta, dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Namun, indikator-indikator tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang sesungguhnya. Yang lebih penting adalah koordinasi antara DISPORA Kota Bandar Lampung dengan KONI Kota Bandar Lampung, karena keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah kegiatan pekan olahraga kecamatan Kota Bandar Lampung.

Kolaborasi adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang saling berbagi sumber daya, ide, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kolaborasi, setiap pihak berkontribusi aktif dan saling melengkapi, bukan sekadar bekerja berdampingan. Kolaborasi antara dinas dan non dinas, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), dengan organisasi non-pemerintah seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Menurut Mahardhika dkk., (2021) program ini memerlukan sinergi yang baik antar stakeholder, sejalan dengan paradigma *good governance*, yakni mengutamakan keterpaduan diantara *state, private, and society* untuk mendukung keberhasilan program. Pemerintah melalui DISPORA bertugas mengatur kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program olahraga yang berfokus pada pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan prestasi. Sementara itu, KONI sebagai organisasi non-pemerintah

memiliki kontribusi besar dalam mengorganisasi kegiatan olahraga, membina atlet, serta mengelola cabang-cabang olahraga yang berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi antara DISPORA dan KONI memungkinkan pembagian tugas yang efektif sehingga pengembangan program olahraga dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) di Kota Bandar Lampung merupakan kegiatan olahraga yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari perencanaan program, penyediaan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pertandingan, hingga proses pembinaan atlet. Kompleksitas tersebut menyebabkan penyelenggaraan PORCAM tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila hanya dilakukan oleh satu lembaga. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung sebagai dua aktor utama yang memiliki kewenangan, sumber daya, dan kapasitas yang saling melengkapi.

Dalam pelaksanaan PORCAM, DISPORA memiliki peran sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, dukungan anggaran, fasilitasi sarana dan prasarana olahraga, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Sementara itu, KONI memiliki fungsi teknis dalam pengelolaan olahraga prestasi, seperti penyusunan regulasi pertandingan, koordinasi cabang olahraga, pembinaan atlet, penyiapan perangkat pertandingan, serta proses penjurangan atlet potensial. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PORCAM sangat bergantung pada kemampuan kedua lembaga dalam menyatukan sumber daya, kewenangan, dan kompetensi yang dimiliki.

Kolaborasi antara DISPORA dan KONI menjadi kebutuhan yang mendasar karena masing-masing lembaga memiliki keterbatasan apabila bekerja secara sendiri-sendiri. DISPORA memiliki kewenangan administratif dan dukungan sumber daya pemerintah, namun tidak memiliki fungsi teknis pembinaan

olahraga prestasi secara langsung. Sebaliknya, KONI memiliki kapasitas dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam penganggaran dan penyediaan fasilitas sebagaimana yang dimiliki pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergi antara DISPORA dan KONI diperlukan agar seluruh tahapan penyelenggaraan PORCAM dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Selain sebagai ajang kompetisi olahraga tingkat kecamatan, PORCAM juga berfungsi sebagai sarana penjarangan bibit atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi pada jenjang yang lebih tinggi, seperti Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) maupun Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan koordinasi yang baik antara DISPORA sebagai penyedia dukungan kebijakan dan sumber daya dengan KONI sebagai pelaksana pembinaan olahraga prestasi. Tanpa adanya kolaborasi yang efektif, pelaksanaan PORCAM berpotensi menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih tugas, kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta tidak maksimalnya proses pembinaan atlet di Kota Bandar Lampung.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, seperti Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM), sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan potensi atlet di tingkat lokal. PORCAM merupakan ajang yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, tetapi juga untuk mempererat hubungan antarwarga di setiap kecamatan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat, kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Pentingnya kolaborasi ini juga terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan PORCAM. Pemerintah, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, anggaran, dan dukungan logistik yang diperlukan. Di sisi lain, organisasi olahraga seperti KONI dan komunitas olahraga lokal ikut serta dalam

mengorganisir dan melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, kolaborasi dalam PORCAM juga memberikan kesempatan bagi atlet muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, atlet muda dapat berlatih dengan lebih baik dan mendapatkan pengalaman berharga dalam kompetisi.

Dalam konteks pengembangan olahraga di Kota Bandar Lampung, sinergi antara DISPORA dan KONI menjadi sangat penting, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan PORCAM. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, namun juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, dalam aktivitas olahraga. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh kedua institusi ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sinergi antara DISPORA dan KONI dalam konteks PORCAM.

Untuk melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan PORCAM di Kota Bandar Lampung, KONI Kota Bandar Lampung melakukan penilaian terhadap pelaksanaan PORCAM pada masing-masing kecamatan. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa indikator, yaitu kemeriahan pembukaan kegiatan, kualitas penyelenggaraan pertandingan, serta jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan PORCAM. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat perbedaan tingkat optimalitas penyelenggaraan PORCAM antar kecamatan di Kota Bandar Lampung.

Perbedaan capaian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan PORCAM tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan olahraga semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menyediakan dukungan sumber daya, sarana prasarana, koordinasi pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, data peringkat kecamatan ini menjadi penting untuk menggambarkan kondisi empiris penyelenggaraan PORCAM di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1.2 Urutan Kecamatan Paling Optimal Hingga Kurang Optimal Dalam Pelaksanaan PORCAM Kora Bandar Lampung.

No	Kecamatan
1.	Labuhan Ratu
2.	Teleuk Betung Timur
3.	Panjang
4.	Kemiling
5.	Kedaton
6.	Teluk Betung Utara
7.	Tanjung katang Timur
8.	Sukarame
9.	Tanjung karang Pusat
10.	Teluk Betung selatan
11.	Tanjung Seneng
12.	Teluk Betiung Barat
13.	Langkapura
14.	Bumi waras
15.	Tanjung Karang Barat
16.	Enggal
17.	Kedamian
18.	Sukabumi
19.	Way halim
20.	Rajabasa

Sumber: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan penilaian KONI Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan PORCAM di masing-masing kecamatan, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.2, terlihat adanya perbedaan tingkat optimalitas penyelenggaraan. Sebagian kecamatan mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, sementara lainnya masih menghadapi kendala koordinasi, sarana, maupun partisipasi masyarakat. Perbedaan capaian ini menegaskan bahwa keberhasilan PORCAM tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pertandingan, tetapi juga oleh kualitas

kolaborasi antar aktor utama, yaitu DISPORA dan KONI. Kondisi ini relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif collaborative governance (Ansell & Gash, 2007), yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama dalam membangun sinergi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kolaborasi DISPORA dan KONI dalam penyelenggaraan PORCAM di Kota Bandar Lampung.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika sinergi antara DISPORA dan KONI, serta rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak hanya akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan olahraga di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan olahraga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan budaya olahraga yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian penulis mengambil dinamika DISPORA Kota Bandar Lampung dan KONI Kota Bandar Lampung dalam menjalin sinergi untuk kegiatan pekan olahraga kecamatan di Kota Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari literatur terdahulu sebagai acuan pada penelitian ini. Adapun studi literatur yang penulis gunakan sebagai acuan pada penelitian ini dijabarkan pada Tabel 1.3

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Purba (2024)	Implementasi Tugas Koni Kota Palangka Raya Pasal 40 UU Keolahragaan RI No 11	Koni Palangka Raya telah menjalankan tugas sesuai UU No. 11 Tahun 2022, namun masih terdapat

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Tahun 2022 dalam Mendukung Prestasi Atlet Di Kota Palangkaraya	kendala dalam koordinasi dan pembinaan atlet secara berkelanjutan.
2.	Haykal (2024)	Penerapan Koni dalam Meningkatkan Prestasi Futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang	Koni berperan aktif dalam pembinaan atlet futsal melalui pelatihan dan kompetisi, namun kolaborasi dengan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan untuk hasil maksimal.
3.	Bila dkk., (2019)	Strategi <i>Collaborative Governance</i> dalam Pemerintahan	<i>Collaborative governance</i> efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila didukung dengan syarat adanya kepercayaan, komitmen dan komunikasi antar aktor kebijakan.
4.	Mahardhika dkk., (2021)	Kolaborasi dan sinergi Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor	Kolaborasi lintas sektor dapat meningkatkan efektivitas pembangunan berkelanjutan jika

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong	didukung oleh sinergi, peran aktif stakeholder, dan regulasi yang jelas.
5.	Sujatmiko dkk., (2023)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Mengatasi Dampak Pandemi Covid 19.	Model Ansel Dan Gash Berhasil di terapkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif, transparansi penguatan kepastian lokal.

Sumber: (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Urgensi penelitian ini kita perlu lebih dalam memahami bagaimana kerjasama antara DISPORA dengan KONI berjalan dalam menggelar PORCAM di Kota Bandar Lampung. Dari sudut pandang studi studi sebelumnya, terlihat jelas bahwa kolaborasi antar pelaku kebijakan publik khususnya di bidang olahraga sangat penting untuk menyukseskan program dan prestasi para atlet. Misalnya, Purba (2024) serta Haykal (2024) membahas peran KONI dalam membina atlet, namun mereka juga tekanan kendala koordinasi dengan pemerintah daerah yang masih sering muncul. Di sisi lain, karya Bila dkk. (2019), Mahardhika dkk., (2021), dan Sujatmiko (2023) menekankan betapa krusialnya tata kelola kolaboratif yang dibangun atas dasar partisipasi, kepercayaan, serta sinergi di antara para pemangku kepentingan. Hasil seperti ini semakin menggarisbawahi perlunya meneliti lebih lanjut soal pola, cara kerja, dan tantangan kolaborasi antara kedua lembaga ini dalam mengembangkan olahraga di tingkat lokal.

Alasan memilih kelima penelitian sebelumnya itu sebenarnya karena relevansinya dengan pertanyaan utama skripsi, yakni bagaimana bentuk kerjasama, peran tiap pihak, ditambah faktor-faktor yang mendukung atau menghalangi pelaksanaan Pekan Olahraga Kecamatan. Studi Purba (2024) dan Haykal (2024) menyajikan bukti nyata tentang kontribusi KONI dalam pelatihan atlet, yang pas banget untuk mengurai peran institusi terkait. Sementara itu, penelitian Bila dkk. (2019), Mahardhika dkk., (2021), serta Sujatmiko dkk. (2023) memberikan landasan teori dan aplikasi praktis soal tata kelola kolaboratif, yang bisa dipakai untuk membedah pola kerjasama, mekanismenya, dan elemen-elemen yang mempengaruhi. Intinya, kelima referensi ini menjadi landasan yang kuat untuk membangun analisis skripsi dan meneguhkan tempatnya pada bidang studi administrasi publik serta pengelolaan kolaboratif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut, “Bagaimana proses kolaborasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) di Kota Bandar Lampung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dinamika yang muncul dalam proses kolaborasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM). Identifikasi yang dilakukan tidak hanya melihat hambatan secara umum tetapi menggunakan cara menelusuri secara spesifik sumber permasalahan kolaborasi, seperti aspek komunikasi antar lembaga, koordinasi pelaksanaan

kegiatan, pembagian peran dan tanggung jawab, dukungan sumber daya, serta kesesuaian prosedur dan mekanisme kerja sama.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses dinamika antara DISPORA dan KONI dengan menggunakan kerangka collaborative governance Ansell and Gash (2007), yang meliputi dimensi dialog tatap muka (*face to face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*). Melalui analisis pada setiap dimensi tersebut, penelitian ini berupaya melihat bagaimana pola interaksi, tingkat keterlibatan para pihak, kualitas koordinasi, serta capaian proses kolaborasi yang telah berjalan dalam pelaksanaan PORCAM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam bidang kepemudaan dan olahraga, terutama mengenai bagaimana lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat bekerja sama. Dengan diidentifikasinya tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang kolaborasi dalam pengelolaan olahraga di tingkat lokal.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di Kota Bandar Lampung. Dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang ada, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkrit untuk meningkatkan

kolaborasi antara DISPORA dan KONI. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu kedua lembaga dalam merancang program-program yang lebih efektif dan menarik bagi masyarakat, khususnya pemuda, sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan olahraga. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana aksi yang lebih terarah dalam penyelenggaraan PORCAM, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengembangan budaya olahraga yang lebih kuat di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pengembangan olahraga di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori *Collaborative Governance*

2.1.1 Pengertian *Collaborative Governance*

Mengistilahkan *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008) dalam buku (Noor et al., 2022 : 40)

1. Kondisi Awal

Pada tahap awal, para pemangku kepentingan menetapkan tujuan dan visi misi bersama agar tercipta kerja sama yang efektif dan sesuai dengan proses yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

2. Desain Kelembagaan

Pemimpin mengajak para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam negosiasi terkait isu yang dihadapi. Dalam konteks *Collaborative Governance*, meskipun konsensus tidak selalu tercapai, kolaborasi tetap dapat berjalan. Desain kelembagaan menitikberatkan pada aturan dan prosedur yang transparan guna membangun kerja sama yang harmonis antara pemimpin dan para pihak terkait.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengelola proses negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Kendala sering muncul akibat gaya kepemimpinan yang kurang tepat, namun hal ini dapat diperbaiki melalui musyawarah, membangun kepercayaan, menetapkan aturan yang jelas, serta pembagian manfaat secara adil.

4. Proses Kolaboratif

Variabel ini sangat krusial dalam model *Collaborative Governance*. Prosesnya melibatkan penciptaan rasa saling percaya dan komitmen bersama dalam perencanaan yang melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun memiliki visi dan misi yang jelas serta pemahaman yang sama dalam menjalankan rencana bersama.

Model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dapat meningkatkan penyelesaian masalah melalui kerja sama dan kepercayaan bersama. Oleh karena itu, permasalahan di Indonesia, seperti stunting, dapat diatasi dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* menggunakan pendekatan *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash.

2.1.2 Dimensi *Collaborative Governance*

(Ansell dan Gash, 2007) menyatakan lima aspek dalam proses *collaborative governance*, yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *share understanding*, hingga *intermediate outcomes*. Proses tersebut merupakan tahapan yang dilalui oleh para *stakeholders* yang berkomitmen secara formal untuk melakukan kolaborasi.

Dimensi

1. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*): Dialog secara tatap muka untuk membuat kesepakatan bersama.
2. Membangun kepercayaan (*Trust building*): Upaya membangun kepercayaan antar stakeholder yang dilakukan pada tahap awal.
3. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*): Suatu bentuk tindakan dan sikap untuk melakukan sesuatu secara bersama. Komitmen juga menunjukkan bentuk tanggung jawab masing-masing stakeholders
4. Pemahaman bersama (*share understanding*): Berbagi pemahaman mengenai apa yang dicapai melalui *collaborative governance*. Dapat berupa misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, ideologi bersama, dan lain-lain.
5. Hasil sementara (*intermediate outcomes*): Output yang nyata melalui *collaborative governance* yang memberikan keuntungan bersama bagi setiap stakeholders.

2.1.3 Evaluasi *Collaborative Governance*

Menurut Ansell and Gash (2008), evaluasi *collaborative governance* tidak hanya berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan saja atau program, tetapi lebih menekankan pada sebuah proses kolaborasi yang berlangsung pada antar aktor. Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh sejauh mana proses tersebut mampu membangun kepercayaan, kesepahaman, dan komitmen bersama antar kedua pihak. Evaluasi *collaborative governance* mencakup beberapa dimensi utama yang saling berkaitan.

1. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*)
interaksi langsung antar pemangku kepentingan menjadi sarana utama untuk membangun komunikasi yang efektif. Melalui dialog tatap muka, para aktor dapat menyampaikan pandangan, kepentingan, serta harapan masing-masing secara terbuka. Evaluasi pada aspek ini melihat seberapa sering pertemuan dilakukan,

bagaimana kualitas diskusi yang terjadi, serta sejauh mana forum tersebut mampu menjadi ruang deliberasi yang setara. Dialog yang intens dan berkelanjutan akan memperkuat hubungan antar aktor dan meminimalisasi kesalahpahaman dalam proses kolaborasi.

2. Membangun kepercayaan (*Trust building*)

kolaborasi tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya rasa saling percaya antar pihak. Evaluasi pada dimensi ini menilai proses terbentuknya kepercayaan, baik melalui konsistensi tindakan, keterbukaan informasi, maupun pemenuhan komitmen yang telah disepakati. Kepercayaan tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang seiring dengan pengalaman kerja sama yang positif. Semakin tinggi tingkat kepercayaan antar aktor, maka semakin besar peluang kolaborasi mencapai tujuan bersama.

3. Komitmen terhadap proses (*Commitment to process*)

komitmen tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran formal dalam pertemuan, tetapi juga melalui kesediaan untuk berbagi sumber daya, waktu, dan tenaga demi keberhasilan kolaborasi. Evaluasi pada aspek ini melihat konsistensi partisipasi, kepatuhan terhadap kesepakatan bersama, serta kesiapan aktor untuk tetap terlibat meskipun menghadapi kendala. Komitmen yang kuat akan menjaga keberlangsungan proses kolaboratif dalam jangka panjang.

4. Pemahaman bersama (*Shared understanding*)

kolaborasi yang efektif mensyaratkan adanya kesamaan persepsi mengenai masalah yang dihadapi, tujuan yang ingin dicapai, serta strategi yang akan ditempuh. Evaluasi pada dimensi ini menilai sejauh mana para aktor memiliki visi dan misi yang selaras serta mampu menyepakati definisi masalah secara kolektif. Pemahaman bersama membantu mengurangi konflik kepentingan dan memperkuat sinergi antar pihak dalam pelaksanaan kolaborasi.

5. Hasil sementara (*intermediate outcomes*)

Hasil sementara merupakan capaian awal yang dihasilkan selama proses kolaborasi berlangsung. Evaluasi pada aspek ini bertujuan untuk melihat apakah kolaborasi mampu menghasilkan manfaat nyata meskipun belum mencapai tujuan akhir. *Small wins* berperan penting dalam meningkatkan motivasi, memperkuat kepercayaan, dan menjaga komitmen para aktor untuk melanjutkan kerja sama. Keberadaan hasil sementara menjadi indikator bahwa proses kolaborasi berjalan ke arah yang positif.

Berdasarkan pandangan Ansell and Gash (2008), evaluasi *collaborative governance* berfokus pada kualitas proses kolaborasi, bukan pada output akhirnya. Lima dimensi utama yang dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara, menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kolaborasi antar aktor. Evaluasi yang komprehensif terhadap kelima aspek tersebut dapat memberikan gambaran sejauh mana *collaborative governance* mampu berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2.2 Bentuk-Bentuk *Collaborative Governance*

Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) memiliki beragam bentuk yang berkembang sesuai dengan konteks dan aktor yang terlibat. Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* adalah suatu proses di mana lembaga publik melibatkan aktor non-pemerintah secara langsung dalam pengambilan keputusan bersama yang bersifat konsensus, guna merumuskan atau mengimplementasikan kebijakan publik.

1. *Collaborative network* atau jaringan kolaboratif. Dalam bentuk ini, kolaborasi dibangun melalui jejaring antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, maupun akademisi yang saling berinteraksi secara rutin untuk mencapai tujuan bersama. Setiap aktor tetap memiliki

otonomi masing-masing, namun bekerja dalam semangat saling ketergantungan dan koordinasi.

2. *Public-private partnership (PPP)* atau kemitraan publik-swasta. Kolaborasi ini melibatkan sektor publik dan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, maupun pengelolaan sumber daya. Pemerintah biasanya berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan pihak swasta bertanggung jawab dalam pendanaan, inovasi, dan pelaksanaan teknis.
3. *Multi-stakeholder collaboration*, yakni kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, akademisi, dan pelaku usaha. Dalam bentuk ini, pengambilan keputusan dilakukan secara mendiskusikan dengan mengutamakan konsensus untuk mencapai kepentingan bersama.
4. *Community-based collaboration*, yaitu kolaborasi berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Bentuk ini sering diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan desa, atau program pemberdayaan masyarakat.
5. *Intergovernmental collaboration* merupakan bentuk kerja sama antar pemerintahan, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi isu lintas wilayah dan lintas kewenangan seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan tata ruang.
6. *Policy co-production* atau produksi bersama kebijakan. Dalam bentuk ini, warga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Bentuk ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil

kebijakan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, berbagai bentuk *collaborative governance* tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi bukan hanya sekadar kerja sama antar, melainkan juga sebuah mekanisme tata kelola yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil bersama.

Intergovernmental collaboration merupakan bentuk kerja sama antar pemerintahan, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar daerah. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi isu lintas wilayah dan lintas kewenangan seperti pengelolaan lingkungan, transportasi, dan tata ruang.

Hubungan keduanya sangat kuat secara kelembagaan dan administratif, karena pelaksanaan kegiatan seperti Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) membutuhkan koordinasi lintas instansi yang bersifat formal termasuk pembagian wewenang, alokasi anggaran, dan penyusunan program. Dengan demikian, bentuk kolaborasi ini menekankan:

- A. Koordinasi antar lembaga publik dalam satu wilayah administrasi (pemerintah daerah dan lembaga mitra resmi negara).
- B. Keterpaduan kebijakan dan sumber daya dalam penyelenggaraan kegiatan publik (PORCAM).
- C. Tujuan bersama dalam pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah.

2.3 Kolaborasi

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kepuasan bersama melalui prinsip *win-to-win*. Menurut Tadjudin Raharja (2010) dalam, Dorisman dkk. (2021) kolaborasi tidak hanya sebatas tindakan bersama, tetapi juga mencerminkan relasi strategis antar organisasi, antar pemerintahan, serta jaringan multi-organisasi

yang saling mendukung. Dalam konteks pemerintahan, kolaborasi antara dinas (instansi pemerintah) dan non-dinas (lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas, dan sektor swasta) menjadi sangat penting untuk menyelesaikan persoalan publik secara lebih efektif dan partisipatif. Kolaborasi ini memungkinkan terjadinya sinergi antara kewenangan formal yang dimiliki oleh dinas dan fleksibilitas serta inovasi yang ditawarkan oleh pihak non-dinas.

Kolaborasi antara pemerintah, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA), dengan organisasi non-pemerintah seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki peran yang sangat vital dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Menurut Mahardhika dkk., (2021) program ini memerlukan sinergi yang baik antar *stakeholder*, sejalan dengan paradigma *good governance*, yakni mengutamakan keterpaduan diantara *state, private, and society* untuk mendukung keberhasilan program.

Kolaborasi sangatlah penting karena dapat membantu untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Ketika orang atau kelompok bekerja sama, mereka bisa saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dan kolaborasi membantu kita bekerja lebih baik bersama-sama, memanfaatkan kekuatan masing-masing, dan mencapai tujuan yang mungkin sulit dicapai sendirian.

2.4 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bandar Lampung

Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja DISPORA. Instansi ini memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah pada sektor kepemudaan

dan olahraga, termasuk di dalamnya proses perumusan hingga implementasi kebijakan daerah yang relevan.

Secara substantif, tugas pokok DISPORA Kota Bandar Lampung adalah menjalankan kewenangan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan olahraga yang didasarkan pada prinsip otonomi daerah serta pelaksanaan tugas perbantuan. Dalam kedudukannya, DISPORA berperan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung memiliki beberapa tugas dan fungsi strategis (LKIP DISPORA, 2022), yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan Dan Olahraga.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 3) Pembinaan dan pengawasan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 4) Pengkoordinasian dengan lembaga lain di Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) merupakan organisasi yang memiliki peran penting dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga di Indonesia. Sebagai organisasi yang berfokus pada olahraga prestasi, KONI bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai organisasi cabang olahraga serta mendukung pelaksanaan kegiatan keolahragaan di tingkat nasional maupun daerah. Dalam menjalankan perannya

tersebut, KONI berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang menjadi dasar dalam melaksanakan pembinaan, pengelolaan, koordinasi, serta pengembangan olahraga prestasi. Adanya tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa KONI tidak hanya berperan sebagai organisasi pembina olahraga, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan olahraga yang terarah, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan prestasi. (AD ART KONI, 2020), Adapun tugas pokok dan fungsi KONI adalah sebagai berikut:

KONI mempunyai tugas:

- 1) Membantu Pemerintah, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah;
- 2) Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota;
- 3) Melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya;
- 4) Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga tingkat nasional dan daerah;
- 5) Membantu dan mendukung penyelenggaraan single event / kejuaraan kejuaraan yang diselenggarakan oleh anggota;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan;
- 7) Menyebarkan semangat gerakan olimpiade.

KONI mempunyai fungsi:

- 1) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan membina serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui pembinaan olahraga secara nasional
- 2) Memasyarakatkan olahraga prestasi yang dibina oleh anggotanya untuk mencapai prestasi olahraga secara optimal.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, dapat dipahami bahwa KONI memiliki peran penting dalam pembinaan, pengembangan, serta koordinasi olahraga prestasi di daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menjadikan KONI sebagai salah satu aktor yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan olahraga, termasuk melalui kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM). Oleh karena itu, tugas dan fungsi KONI menjadi salah satu landasan yang menunjukkan pentingnya keterlibatan KONI dalam mewujudkan penyelenggaraan PORCAM yang efektif dan mendukung pembinaan olahraga prestasi di tingkat daerah.

2.6 Peran DISPORA dan KONI

Peran DISPORA dan KONI dalam penyelenggaraan PORCAM Kota Bandar Lampung, maka ada empat kesamaan utama yang sangat kuat untuk dijadikan dasar analisis, yaitu:

1. Sama-sama memiliki fungsi koordinasi.

DISPORA bertugas mengoordinasikan dengan lembaga lain di bidang kepemudaan dan olahraga, sedangkan KONI mengoordinasikan organisasi cabang olahraga serta KONI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesamaan ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan tanggung jawab kedua lembaga sehingga kolaborasi menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan PORCAM.

2. Sama-sama memiliki fungsi pembinaan olahraga.

DISPORA melaksanakan pembinaan di bidang olahraga secara umum, sedangkan KONI berfokus pada pembinaan olahraga prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kualitas olahraga.

3. Sama-sama berperan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.
DISPORA bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang olahraga, sementara KONI memiliki tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pekan olahraga serta mendukung penyelenggaraan berbagai kejuaraan. Oleh karena itu, pelaksanaan PORCAM secara ideal membutuhkan keterlibatan kedua pihak.
4. Sama-sama mendukung pengembangan olahraga prestasi.
Walaupun DISPORA lebih berorientasi pada pelayanan publik di bidang olahraga dan KONI lebih fokus pada pembinaan prestasi, tujuan akhirnya tetap sama, yaitu meningkatkan kualitas olahraga dan menghasilkan atlet-atlet berprestasi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga, terdapat beberapa kesamaan peran antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Keduanya sama-sama memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, koordinasi, serta penyelenggaraan kegiatan olahraga. Selain itu, kedua lembaga juga berperan dalam mendukung pengembangan olahraga prestasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang saling berkaitan. Kesamaan tugas dan fungsi tersebut menjadi dasar penting bagi terjalannya kolaborasi antara DISPORA dan KONI dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM), karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Bandar Lampung.

2.7 Pekan Olahraga Kecamatan

Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) adalah sebuah ajang kompetisi olahraga yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Tujuan utama dari pekan olaharag kecamatan adalah untuk mempromosikan olahraga di kalangan

masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan fisik, serta menjalin hubungan sosial antarwarga. Selain itu, pekan olahraga kecamatan juga bertujuan untuk mencari dan mengembangkan bakat-bakat atlet muda di tingkat lokal, yang dapat diharapkan untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) memberikan berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat. PORCAM mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, yang dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dengan berolahraga secara teratur, individu dapat mengurangi risiko penyakit, meningkatkan stamina, dan memperbaiki suasana hati. Selain itu, PORCAM juga berfungsi sebagai ajang untuk mempererat hubungan sosial antarwarga. Melalui kompetisi dan kegiatan bersama, masyarakat dapat saling mengenal, membangun persahabatan, dan menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat.

Selanjutnya, PORCAM dapat menjadi sarana untuk menemukan dan mengembangkan bakat atlet muda di tingkat lokal. Dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk berkompetisi, mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka dan berpotensi untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, pekan olahraga kecamatan tidak hanya berkontribusi pada kesehatan individu, tetapi juga pada penguatan komunitas dan pengembangan potensi generasi muda.

DISPORA bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat daerah. Mereka berperan dalam mengkoordinasikan semua aspek yang berkaitan dengan mulai dari penyediaan fasilitas olahraga, pengaturan jadwal, hingga pengawasan pelaksanaan kompetisi. DISPORA juga berfungsi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam olahraga, serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Selain itu, mereka dapat memberikan

dukungan dalam hal pembinaan atlet dan pelatih, serta memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di sisi lain, KONI berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan berbagai cabang olahraga dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan untuk menyukseskan pekan olahraga kecamatan. KONI bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga dapat membantu dalam pengembangan bakat atlet muda melalui pelatihan dan pembinaan yang lebih terstruktur. Dengan kolaborasi antara DISPORA dan KONI, pekan olahraga kecamatan diharapkan dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendorong semangat olahraga di tingkat kecamatan.

2.8 Tantangan dan Hambatan Dalam Kolaborasi

Menurut Agranoff dan McGuire (2003), tantangan serta hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi dapat diklasifikasikan ke dalam delapan aspek utama, yaitu:

1. Kepemimpinan yang efektif

Kepemimpinan dalam konteks kolaboratif menghadapi tantangan dalam upaya menginspirasi sekaligus mengarahkan aktor-aktor yang heterogen, serta mampu mengelola dinamika kekuasaan dan pengaruh yang muncul di antara organisasi yang terlibat.

2. Kepercayaan antar organisasi

Upaya membangun serta mempertahankan tingkat kepercayaan di antara berbagai institusi pemerintahan kerap menjadi persoalan yang kompleks dan tidak mudah untuk diwujudkan secara berkelanjutan.

3. Komunikasi yang efektif

Kualitas komunikasi yang tidak optimal berpotensi menjadi faktor penghambat dalam kolaborasi. Permasalahan ini berkaitan dengan

keterbatasan dalam pertukaran informasi, potensi kesalahpahaman akibat perbedaan terminologi maupun budaya organisasi, serta belum tersedianya saluran komunikasi yang jelas dan terbuka.

4. Ketergantungan dan koordinasi tugas

Adanya ketergantungan antar tugas menuntut tingkat koordinasi yang tinggi, karena lemahnya koordinasi pada kondisi tugas yang saling bergantung dapat menimbulkan inefisiensi, keterlambatan, hingga kegagalan dalam mencapai tujuan kolektif.

5. Perbedaan tujuan dan prioritas

Setiap organisasi yang terlibat dalam kolaborasi umumnya memiliki orientasi tujuan dan prioritas yang berbeda. Proses penyesuaian tujuan antar organisasi menjadi tantangan krusial, khususnya ketika terdapat perbedaan dalam visi, misi, serta target yang ingin dicapai.

6. Keterbatasan sumber daya

Pelaksanaan kolaborasi sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut mencakup aspek anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta dukungan teknologi yang memadai.

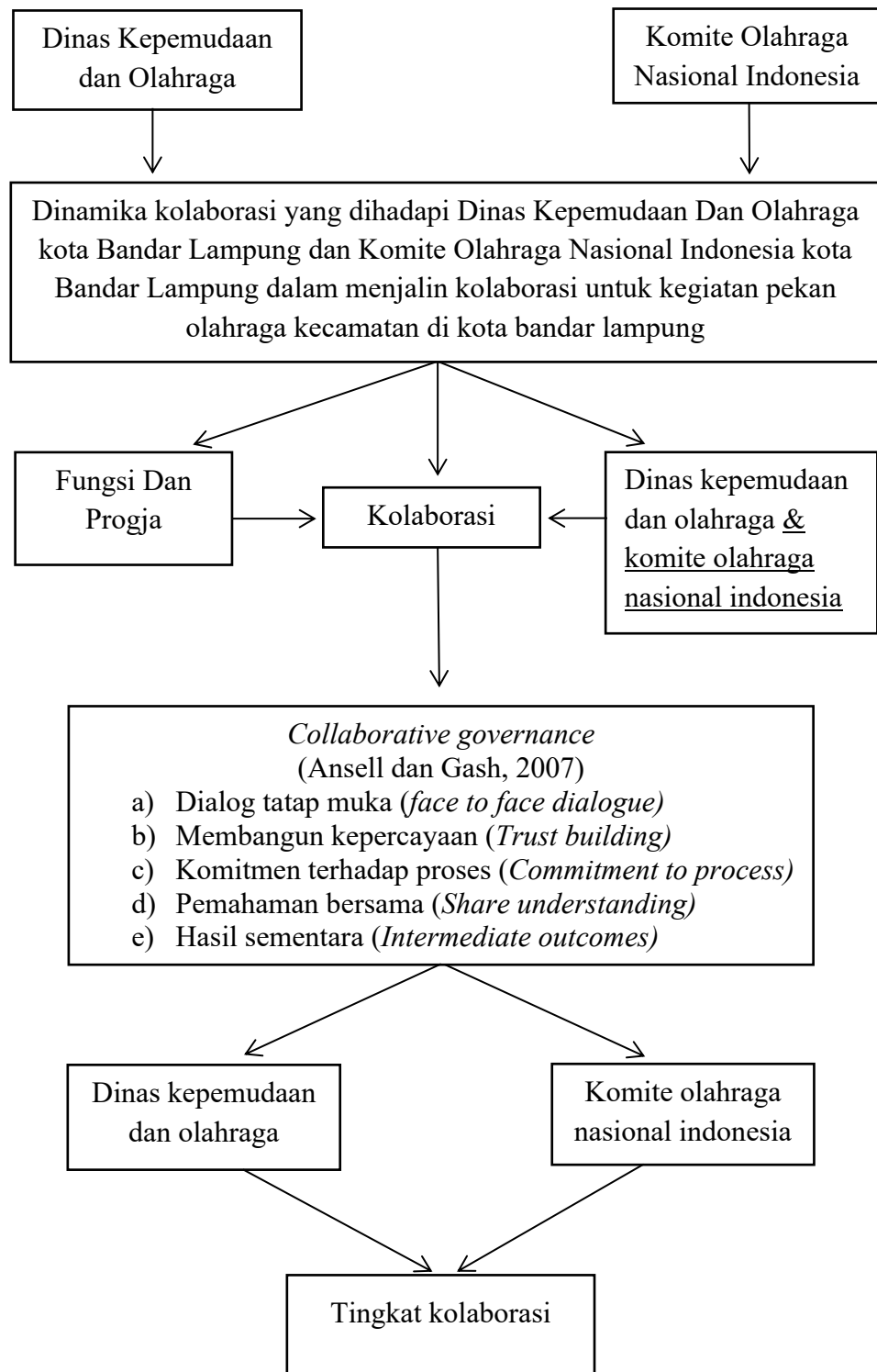
7. Regulasi dan birokrasi

Struktur birokrasi yang cenderung kaku serta kompleksitas regulasi dapat mengurangi tingkat fleksibilitas yang dibutuhkan dalam kolaborasi. Selain itu, perbedaan ketentuan dan aturan antar organisasi juga berpotensi menjadi kendala dalam implementasi kolaboratif.

8. Kultur organisasi

Setiap organisasi memiliki karakteristik budaya kerja, nilai, dan norma yang berbeda, sehingga kondisi tersebut dapat memicu terjadinya konflik maupun ketegangan di antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi.

2.9 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada jenis penelitian deskriptif yang mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendalami satu variabel penelitian dengan tujuan memberikan pemahaman yang rinci sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian deskriptif memberikan landasan untuk menjelaskan karakteristik khusus dari fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, karakteristik kualitatif digunakan untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam, yang bisa berbentuk kata-kata atau bahkan gambar (Sugiyono, 2019).

Melalui metode kualitatif, peneliti mampu mengeksplorasi berbagai perspektif, interpretasi, serta pengalaman individu yang terlibat, sehingga membuka wawasan mendalam dalam menganalisis tantangan dan kendala yang muncul dalam kolaborasi antara DISPORA Kota Bandar Lampung dengan KONI Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk secara rinci dan teliti menggambarkan topik atau permasalahan yang diteliti, berdasarkan pengalaman serta temuan yang diperoleh langsung dari lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mempersempit lingkup studi kualitatif, secara selektif memilah data yang relevan dan membedakan data yang kurang relevan (Moleong, 2018). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi dari masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini.

Pada Permasalahan dan teori yang dipergunakan, dalam penelitian berfokus pada “Bagaimana Proses Kolaborasi Antara Dinas Kepemudaan Dan Olahrag (DISPORA) Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan di Kota Bandar Lampung” Penelitian ini difokuskan pada identifikasi dan analisis proses kolaborasi yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandar Lampung dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandar Lampung dalam menjalin kolaborasi untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM). Fokus ini mencakup pemahaman terhadap dinamika kerja sama antar lembaga, faktor-faktor penghambat yang muncul, serta implikasi dari hambatan tersebut terhadap pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat kecamatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada landasan teoritis serta pemahaman mendalam terkait fokus permasalahan yang diangkat. Penelitian dilaksanakan di dua instansi, yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pelaksanaan penelitian di tempat tersebut bertujuan untuk mengamati fenomena atau kejadian nyata yang terjadi, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi sesungguhnya dengan akurat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta atau peristiwa dalam bentuk mentah yang belum mengalami proses pengolahan. Menurut (Moleong, 2018) sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif berbentuk kata-kata dan tindakan, untuk selanjutnya ditunjang dengan data sekunder yang mana berbentuk dokumen, sumber data tertulis, foto, atau data-data statistik.

Untuk selanjutnya terkait dengan sumber data dan subyek dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses pengumpulan di lapangan, seperti wawancara. Data ini sangat penting karena memberikan informasi yang autentik dan mendalam mengenai objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para informan kunci. Informan yang dimaksud meliputi aparatur pemerintah dari DISPORA Kota Bandar Lampung, serta ketua dan sekretaris KONI Kota Bandar Lampung. Melalui interaksi langsung dengan para informan tersebut, peneliti dapat menggali informasi yang relevan dan detail terkait dinamika dalam kolaborasi antara kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, data primer ini menjadi sumber utama yang mendukung analisis dan kesimpulan penelitian secara akurat dan komprehensif.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, berupa dokumen-dokumen seperti literatur, peraturan resmi pemerintah seperti peraturan menteri dan surat edaran menteri, jurnal ilmiah, artikel, serta informasi yang diakses melalui internet. Selain itu, data sekunder juga mencakup karya tulis dari para ahli yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, serta berbagai bahan referensi lain yang relevan dan mendukung analisis dalam penelitian yang dilakukan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan penunjang untuk memperkuat landasan teori serta konteks penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan merupakan individu yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan dan situasi latar belakang penelitian (Moleong, 2006). Dalam penelitian ini, guna mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan, peneliti harus berinteraksi dengan informan yang memiliki pemahaman mengenai masalah yang sedang diteliti.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Nero Rakhmat Akbar	Kepala Dinas DISPORA
2.	Muhammad Nur Arifin	Kepala Bidang Olahraga DISPORA
3.	Rahmudin	Sekretaris Umum KONI
4.	Dwi Priyono	Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI
5.	Irfan Saputra	Sekretaris Kecamatan Kedaton
6.	Muhammad Hanif Muzaki	Atlet Voli Pekan Olahraga Kecamatan Langkapura 2024
7.	Elva Sanwani	Pengawas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci pada pengumpulan data. Pengumpulan data dalam

penelitian ini telah dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut (Esterberg dalam (Sugiyono, 2019), wawancara adalah pertemuan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan pikiran melalui tanya jawab, sehingga dapat mendapatkan sebuah informasi pada suatu topik yang dituju. Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai beberapa informan yang dianggap sebagai informan penting.

2. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi menjadi elemen penting dalam metodologi penelitian kualitatif, berfungsi sebagai pelengkap bagi observasi dan wawancara (Sugiyono, 2019). Teknik ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan beragam data sekunder yang berasal dari sumber tertulis seperti dokumen. Dokumen memiliki nilai penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap inti penelitian, dapat digunakan untuk melakukan *triangulasi* data guna memastikan konsistensi temuan, dan merupakan komponen integral dalam proses penelitian.

3.7 Teknik Pengolahan Data

1. *Editing* Data

Editing Data merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dikutip dari sumber lain, seperti literatur. Sementara itu, editing data adalah tahap dalam penelitian yang melibatkan penentuan dan pemilahan data yang berhasil dikumpulkan untuk memastikan validitas

nya serta mempersiapkannya agar siap digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan menyesuaikan nya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara, serta memilih data yang relevan untuk keperluan penulisan. Selain itu, dalam mengelola hasil observasi, peneliti mengumpulkan informasi penting yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, sehingga data tersebut dapat disajikan secara sistematis dan didukung oleh dokumentasi yang memperkuat pembahasan dalam penelitian.

2. *Interpretasi Data*

Pada tahap ini, peneliti menyajikan uraian dari berbagai data yang telah diolah melalui proses editing sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian. Teknik yang digunakan melibatkan penggabungan hasil analisis data yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria pertanyaan atau kategori khusus lainnya. Selama pelaksanaan interpretasi data, peneliti memberikan penjelasan dalam bentuk narasi dan deskripsi yang menggambarkan data secara rinci, disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menyederhanakan, memfokuskan, menyeleksi, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian (Hikmawati, 2020). (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2019) menjelaskan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini menggunakan panduan analisis data dari Miles dan Huberman. Analisis ini sendiri sudah berlangsung sejak pengumpulan data

dilakukan, yang kemudian langkah selanjutnya data tersebut dianalisis. Model analisis ini bertujuan untuk mencapai data yang paling kredibel, yang apabila pada proses pelaksanaannya analisis jawaban dari wawancara kurang memuaskan maka peneliti mengulangi proses dengan melanjutkan pertanyaan sampai data tersebut terpenuhi (Sugiyono, 2019).

3.9 Validasi Data

Teknik validasi data digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kualitas yang baik serta tingkat akurasi yang tinggi. Melalui proses validasi ini, data yang dikumpulkan dapat diuji kebenarannya sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, validasi data juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses penafsiran dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang benar dan relevan. Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui wawancara dengan informan serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih akurat dari berbagai sudut pandang.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Kolaborasi yang dilakukan masih banyak bergantung pada kesepahaman informal, tanpa adanya dasar formal berupa *Memorandum of Understanding* (MOU) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini membuat koordinasi antar lembaga belum konsisten dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran.

Pada dimensi dialog tatap muka, komunikasi antar aktor sudah terjalin melalui rapat koordinasi dan forum persiapan kegiatan. Namun, intensitas dan kualitas dialog masih perlu ditingkatkan agar menghasilkan kesepakatan yang lebih jelas. Pada dimensi membangun kepercayaan, hubungan DISPORA dan KONI relatif baik, tetapi belum sepenuhnya kuat karena masih terdapat keraguan terkait komitmen jangka panjang.

Dimensi komitmen terhadap proses menjadi kelemahan utama, ditandai dengan belum adanya dokumen kerja sama formal. Tanpa dasar hukum yang jelas, kolaborasi cenderung bergantung pada kepemimpinan dan situasi tertentu. Sementara itu, pada dimensi pemahaman bersama, kedua lembaga memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga, tetapi belum sepenuhnya menyatukan strategi dan langkah operasional.

Pada dimensi hasil sementara penyelenggaraan PORCAM telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi masyarakat, munculnya bibit

atlet baru, serta adanya variasi capaian antar kecamatan. Namun, perbedaan tingkat optimalitas antar wilayah menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi belum merata.

Secara keseluruhan, Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) serta dari tugas dan fungsi DISPORA dan KONI bahwa kolaborasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM) perlu diperkuat melalui penyusunan *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), peningkatan koordinasi, serta penguatan kepercayaan antar aktor. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan PORCAM dapat lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembinaan atlet menuju tingkat provinsi maupun nasional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas kolaborasi antara DISPORA dan KONI dalam penyelenggaraan PORCAM, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi stakeholders

DISPORA dan KONI disarankan untuk memperluas keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan dan evaluasi kegiatan PORCAM, khususnya atlet, pelatih, dan masyarakat. Keterlibatan langsung stakeholder tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan kendala di lapangan, sehingga kebijakan dan program yang dirumuskan dapat lebih sesuai dengan kondisi nyata.

2. Penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi

diperlukan penguatan komitmen kolaborasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui penyusunan instrumen formal kerja sama. Oleh karena itu, kedua lembaga disarankan untuk segera menyusun dan menetapkan *Memorandum*

of Understanding (MOU) sebagai landasan awal yang memuat kesepakatan mengenai tujuan, ruang lingkup, dan prinsip kerja sama dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM). Keberadaan MOU ini penting untuk memberikan arah yang jelas serta memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan kolaborasi secara lebih terstruktur. Selanjutnya, MOU tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur secara lebih teknis mengenai pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antar pihak. Dengan adanya PKS, diharapkan pelaksanaan kolaborasi tidak lagi bergantung pada kesepakatan informal, melainkan memiliki dasar administratif yang jelas sehingga dapat meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan kerja sama dalam penyelenggaraan PORCAM di Kota Bandar Lampung.

3. Pengembangan sistem evaluasi yang terintegrasi

DISPORA dan KONI disarankan untuk menyusun mekanisme evaluasi pelaksanaan PORCAM yang lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Evaluasi yang terintegrasi dapat menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan program di masa mendatang serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan olahraga di tingkat kecamatan.

4. Peningkatan dukungan sumber daya

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan PORCAM, baik dalam bentuk anggaran, sarana dan prasarana olahraga, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dukungan tersebut sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan kualitas pembinaan atlet di tingkat lokal.

5. Pengaturan keberlanjutan program kolaborasi

DISPORA dan KONI perlu mengembangkan pola kerja sama yang bersifat jangka panjang melalui penyusunan rencana strategis kolaborasi yang jelas. Keberlanjutan program kolaborasi akan memperkuat sinergi antar lembaga serta mendukung pengembangan olahraga daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
- Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Collaboration Between Stakeholders In Traffic Accident Management ada hasil atau perubahan yang signifikan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 70–83. https://www.academia.edu/106156786/Kolaborasi_Antar_Stakeholder_Dalam_Penanggulangan_Kecelakaan_Lalu_Lintas
- Dwisvimiar, I., & Setiawan, H. (2021). Akselerasi Pembangunan Kepemudaan Melalui Konsep Pemberdayaan Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Masyarakat Di Era Industri 4.0. *Jurnal Kreativitas Dan Inovasi (Jurnal Kreanova)*, 1(2), 74–80. <https://doi.org/10.24034/kreanova.v1i2.5021>
- Haykal, A. M. (2024). Peranan Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam Meningkatkan Prestasi Futsal di Kabupaten Sidenreng Rappang. In *Doctoral dissertation, IAIN Parepare*. IAIN Parepare.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*.
- BPS Kota Bandar Lampung (2024). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan*. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. <https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzIjMg==/jumlah-penduduk-berdasarkan-jenis-kelamin.html>. Diakses Pada 5 Agustus 2025 Pukul 10.12
- Lampung Viva. (2024). *PORCAM Bandar Lampung Digelar 22 Juli hingga 10 Agustus 2024*. <https://lampung.viva.co.id/olahraga/2966-porcam-bandar-lampung-digelar-22-juli-hingga-10-agustus-2024>. Diakses Pada 20 Agustus 2025 Pukul 10.45
- Lustikasari, L. D. (2019). Pekan Olahraga Kecamatan (Porcam) Teluk Betung Selatan Resmi Dibuka. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/lampunggeh/pekan-olahraga-kecamatan-porcam-teluk-betung-selatan-resmi-dibuka-1553171239695756480>. Diakses Pada 27

Oktober 2025 Pukul 14.43

- Mahardhika Berliandaldo, Achmad Chodiq, & Driszal Fryantoni. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 04, 221–234.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. R. 22nd (ed.)). Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Lampung Monitor. (2024). *Pemkot Bandar Lampung Gelar Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan*. <https://lampungmonitor.com/daerah/pemkot-bandar-lampung-gelar-pekan-olahraga-tingkat-kecamatan/>. Diakses Pada 23 September 23.05
- Mujib, A., & Pramono, M. (2020). Analisis Tingkat Dehidrasi Pada Atlet Pencak Silat PUSLATDA JATIM 2019. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 8, 117–122.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Bildung Nusantara.
- Purba, A. R. (2024). Implementasi Tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palangka Raya Pasal 40 UU Keolahragaan RI No 11 Tahun 2022 dalam Mendukung Prestasi Atlet di Kota Palangkaraya. In *Repositori UPR*. Universitas Palangka Raya.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujatmiko, S., Orbawati, E. B., -, F., & Mukti, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2528>